



Beda Harga Picu Penyelundupan

Penarikan Sebaiknya Tunggu Daerah Selesai Konversi

YOGYAKARTA, KOMPAS — Penarikan minyak tanah bersubsidi di Kota Yogyakarta dan Sleman dinilai bisa memicu penyelewengan berupa penyelundupan dan penimbunan minyak tanah. Hal ini akibat perbedaan harga yang mencolok antarkabupaten dan kota di DI Yogyakarta.

"Perbedaan harga antara daerah yang belum dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan yang sudah sangat besar. Bisa saja minyak tanah bersubsidi di Bantul dijual ke Yogyakarta yang harganya sudah tinggi. Ini kebijakan yang bisa memicu tindakan kriminal," tutur Nanang Ismuhartoyo, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta, Rabu (12/11) di Yogyakarta.

Kemungkinan tindakan penyelundupan cukup besar karena faktor kedekatan wilayah. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan dirugikan. Pasokan minyak tanah bersubsidi di Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo akan berkurang sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan warga di tiga kabupaten itu.

"Penyelundupan sangat mungkin karena keuntungan yang bisa diperoleh cukup besar," katanya.

Kepala Seksi Migas Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY Polin MW Napitu Sekretaris Daerah

Pulu mengemukakan, Pertamina sebaiknya membatalkan penarikan minyak tanah bersubsidi di Kota Yogyakarta dan Sleman yang dilakukan sejak 1 November.

Penarikan secara mendadak rentan menimbulkan kelangkaan sehingga bisa memicu munculnya masalah lain yang lebih berat.

Terburu-buru

Menurut Nanang, penarikan minyak tanah bersubsidi di DIY terlalu terburu-buru dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah pusat. Padahal, di tingkat nasional program konversi baru selesai akhir 2009. Pada saat itulah seharusnya penarikan baru dilakukan.

"Kami minta Pertamina menunda dulu penarikan minyak tanah bersubsidi ini. Setidaknya sampai seluruh wilayah di DIY selesai melaksanakan program konversi gas," ujar Nanang.

Secara terpisah, ketika dimin-



Nanang Ismuhartoyo

tai tanggapan, Assistant Manager External Relation Pertamina Jawa Tengah-DIY Heppy Wulansari menuturkan, kewajiban Pertamina hanya sampai menjual, bukan sampai menangani kemungkinan penyelundupan, bahkan penimbunan minyak tanah. "Urusan itu sudah di ranah kepolisian," katanya.

Menyinggung kapan penyaluran minyak tanah nonsubsidi, menurut Heppy, direncanakan minggu depan. Pertamina tidak segera menyalurkan minyak tanah nonsubsidi ke agen karena menunggu sisa minyak tanah bersubsidi habis.

(RWN/ARA/PRA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 29 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005